

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang sudah berganti menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Bursa Efek Indonesia (BEI) terbentuk dari hasil penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Bursa hasil penggabungan ini resmi beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007. Dan sampai dengan bulan Januari tahun 2016, jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah 525 perusahaan (www.sahamok.com). Dan 20 di antaranya merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari berbagai sektor.

Pada saat ini perkembangan perusahaan *go public* di Indonesia semakin pesat dan dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berada dalam perdagangan saham, yaitu sebanyak 486 pada bulan desember 2013 dan menjadi 532 perusahaan pada bulan agustus 2016. Salah satu tujuan dari perdagangan saham ini adalah untuk menarik investor agar menanamkan kebutuhan berinvestasi di pasar modal, yang secara tidak langsung hal ini dapat meningkatkan kinerja pengembangan bisnis mereka (sahamok.com).

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 19 pasal 1 ayat 4 tahun 2003. Berikut adalah daftar perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia disajikan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1**Daftar Perusahaan BUMN Tahun 2016**

No	Kode	Nama Perusahaan	Sektor
1	INAF	PT Indofarma (persero) Tbk	Farmasi
2	KAEF	PT Kimia Farma (persero) Tbk	Farmasi
3	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Energi
4	KRAS	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Industri Logam
5	ADHI	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Konstruksi
6	PTPP	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Konstruksi
7	WIKA	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Konstruksi
8	WSKT	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Konstruksi
9	ANTM	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Pertambangan
10	PTBA	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Pertambangan
11	TINS	PT Timah (Persero) Tbk	Pertambangan
12	SMBR	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Semen
13	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Semen
14	JSMR	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Angkutan dan Prasarana Angkutan

15	GIAA	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Angkutan dan Prasarana Angkutan
16	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Telekomunikasi
17	BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Bank
18	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Bank
19	BBTN	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Bank
20	BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank

Sumber :<http://www.sahamok.com>

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya tujuan utama yang ingin dicapai oleh semua perusahaan adalah bagaimana perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas atau tindakan ekonomi perusahaan. Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, misalnya pengundulan hutan, polusi udara dan air, dan perubahan iklim. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, banyak perusahaan yang hanya berorientasi pada maksimalisasi laba untuk menunjukkan kinerjanya dan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan (Ratnasari, 2011).

Hal tersebut mendorong adanya pembagian konsentrasi perusahaan dari pencarian laba maksimal ke konsentrasi terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang diaplikasikan dalam suatu bentuk CSR. Sebab, praktik CSR pada suatu perusahaan nyatanya dianggap menjadi suatu jaminan penting bagi *stakeholder* bahwa perusahaan tersebut memberikan timbal balik atas keuntungan yang mereka peroleh dari lingkungan di sekitar mereka (Anugerah, 2011).

Moon dan Vogel (2008:304) mendefinisikan CSR sebagai suatu kewajiban, untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada untuk membuat keputusan, atau untuk mengikuti tindakan yang diinginkan dalam arti objektif dan nilai yang ada di masyarakat. Konsep CSR pertama kali ada dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman*. Konsep yang digagas Howard Rothmann

Brown ini menjawab keresahan dunia bisnis (Carroll, 1999 dalam Solihin, 2008). Howard Rothmann Brown mengungkapkan bahwa keberadaan CSR bukan karena diwajibkan oleh pemerintah atau penguasa, melainkan merupakan komitmen yang lahir dalam konteks etika bisnis (*beyond legal aspects*) agar sejahtera bersama masyarakat berdasarkan prinsip kepantasan sesuai nilai dan kebutuhan masyarakat. Belakangan CSR segera diadopsi, karena bisa jadi penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur dalam pikiran masyarakat dan lebih dari itu pengusaha dicap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan.

Seiring adanya perkembangan CSR, perusahaan mulai menyadari untuk mengungkapkan sebuah laporan yang tidak hanya berpijak pada *single bottom line*, yaitu kondisi keuangan perusahaan saja tetapi berpijak pada *triple bottom line*, yaitu selain informasi keuangan juga menyediakan informasi sosial dan lingkungan, yang kemudian disebut *sustainability report*. *Sustainability report* ini disusun dengan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) yang telah dikembangkan sejak tahun 1990 dan disusun tersendiri terpisah dari laporan keuangan atau laporan tahunan (Ratnasari, 2011). Informasi tentang tanggung jawab perusahaan yang sekarang menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan, ternyata sangat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan karena informasi tersebut digunakan sebagai dasar bagi mereka yang berhubungan dengan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung diantaranya yaitu para investor dan calon investor sebagai dasar pengambil keputusan investasi, karyawan perusahaan sebagai bahan dasar untuk memperkirakan keberlangsungan nasib mereka bekerja di dalam perusahaan, dan pihak-pihak eksternal baik yg berhubungan langsung maupun tidak langsung yang menggunakan laporan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bahan acuan dasar untuk mengawasi dan mengontrol jalannya kegiatan perusahaan agar dapat menciptakan keadaan yang serasi antara perusahaan dan lingkungan sosial (Khadifa dan Chariri, 2014).

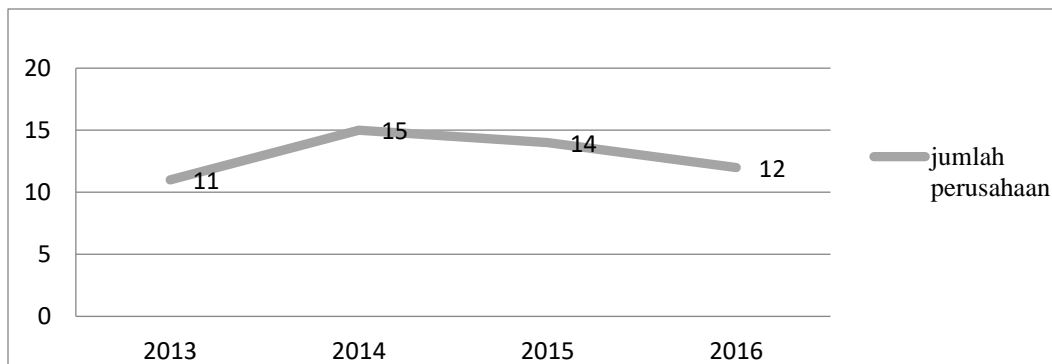
Di Indonesia, pemerintah juga memberlakukan peraturan yang mengharuskan perusahaan dalam mengungkapkan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) yang tertuang pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 Bab IV pasal 66 mengenai Laporan Tahunan, pada ayat 2 butir c dijelaskan bahwa direksi dalam menyampaikan laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya laporan mengenai pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (www.bpkp.go.id). Peraturan lainnya adalah dari Otoritas Jasa Keuangan No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emitmen atau Perusahaan Publik yang menjelaskan bahwa laporan tahunan wajib memuat

mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (www.ojk.go.id).

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan fenomena yang umum terjadi di beberapa sebagian besar perusahaan di Indonesia dan dari data yang saya olah pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2013 sampai dengan 2016 terdapat 9 perusahaan BUMN yang tidak menerbitkan laporan tanggung jawab sosialnya secara konsisten tiap tahun dalam laporan berkelanjutan (*sustainability report*), dapat dilihat pada grafik 1.1 data jumlah perusahaan BUMN yang mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial pada laporan berkelanjutan dari tahun 2013 sampai dengan 2016.

Grafik 1.1

Rata-rata pengungkapan CSR perusahaan BUMN tahun 2013-2016



sumber data yang diolah

Berdasarkan grafik 1.1 Pengungkapan CSR perusahaan BUMN pada tahun 2013-2014 pengungkapan CSR terus meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan BUMN pada tahun 2013-2014 sudah lebih dari 50% perusahaan dari 20 perusahaan BUMN yang tercatat di BEI. Pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan pengungkapan CSR dari tahun sebelumnya, kemungkinan perusahaan BUMN yang tercatat di BEI masih belum konsisten untuk mengungkapkan CSR.

Pengungkapan Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*) semakin mendapat perhatian dalam praktek bisnis global dan menjadi salah satu kriteria dalam menilai tanggung jawab sosial suatu perusahaan. *Sustainability Report* disusun berdasarkan kerangka pelaporan GRI 4.0 mengungkapkan keluasan dan hasil yang terjadi dalam suatu periode laporan tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, dan pendekatan manajemennya. Kerangka pelaporan GRI

4.0 ditujukan sebuah kerangka yang dapat diterima umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi (GRI 4.0, 2013). Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang perusahaan milik negara dan peraturan kementerian BUMN PER – 09/MBU/07/2015 bersifat wajib. Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Corporate Governance*, yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan *stakeholders*-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama, 2007). Menurut Said *et.al.* (2009) *Corporate Governance* sangat efektif untuk memastikan bahwa kepentingan *stakeholders* telah dilindungi. Oleh karena itu, perusahaan harus mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan terhadap para *stakeholder*. Penerapan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri, 2009). Untuk mendukung hal tersebut, pelaksanaan *Good Corporate Governance* harus didukung dengan struktur *corporate governance* terdiri dari organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan direksi, dewan komisaris dan juga perusahaan lain yang membantu terwujudnya *Good Governance* seperti sekretaris perusahaan, komite audit, dan komite-komite lain yang membantu pelaksanaan GCG (Ratnasari, 2011).

Konsep *good corporate governance* secara definitif diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar selalu menciptakan nilai tambah untuk semua *stockholder* dan *stakeholder*-nya. Konsep ini menekankan hak *stockholder* dan *stakeholder* untuk memperoleh informasi akurat dan tepat waktu (*timeliness*) serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan atas semua informasi mengenai perusahaan. Apabil konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan akan memberikan keuntungan bagi semua pihak (Nasution dan Setiawan, 2007)

Dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekankan manajemen untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Fungsi dewan komisaris adalah untuk mengawasi direksi baik yang berhubungan dengan kebijakan dan pelaksanaan direksi, dewan komisaris berfungsi juga untuk

memberikan saran kepada direksi. Untuk menjalankan fungsinya itu, maka anggota dewan komisaris merupakan seorang yang berkarakter baik dan memiliki pengalaman yang relevan. Dalam mengukur dewan komisaris digunakan ukuran dan jumlah rapat dewan komisaris, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2011). Penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR (Badjuri, 2011). Akan tetapi terdapat perbedaan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyani dan Sisdyani, 2015) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Komisaris independen merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (Putri, 2013). Keberadaan dewan komisaris independen dapat memberi tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report* dalam rangka memastikan keselarasan antara keputusan dan tindakan perusahaan dengan nilai-nilai sosial dan legitimasi perusahaan (Ratnasari, 2011). Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, (Dananjaya dan Ardiana, 2016). Penelitian terdahulu menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR (Untoro dan Zulaikha, 2013). Akan tetapi terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh (Badjuri, 2011) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Menurut Foker, 1992 dalam Said *et.al.* 2009, komite audit merupakan alat efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Peran komite audit seringkali dihubungkan dengan kualitas pelaporan keuangan karena dapat membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Meiranto, 2013 dalam Suaryana, 2005). Dalam mengukur komite audit digunakan ukuran dan jumlah rapat komite audit, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2011). Penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR (Badjuri, 2011). Akan tetapi terdapat perbedaan seperti penelitian yang dilakukan oleh (Nugraha, 2013) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR, sehingga peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, PROPORSI DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN dan UKURAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Kasus pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta dapat memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan UU. No 40 Tahun 2007, sehingga dewan direksi memiliki wewenang dalam mengawasi direksi baik yang berhubungan dengan kebijakan maupun pelaksanaan direksi perusahaan, akan tetapi dewan direksi yang ada pada perusahaan di Indonesia belum mampu membuat tata kelola perusahaan dengan baik, hal ini menyebabkan rendahnya kualitas dan kuantitas praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia.

Hal ini menjadi menarik dikarenakan belum mampunya dewan direksi membuat tata kelola perusahaan yang baik menjadi dampak tersendiri bagi kualitas pengungkapan CSR yang ada, sehingga rendahnya kualitas pengungkapan CSR menjadi dampak buruk bagi perusahaan yang belum dapat mengungkapkan CSRnya dengan baik.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang diidentifikasi dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan BUMN tahun 2013-2016?
2. Apakah pengaruh secara simultan ukuran dewan komisaris, , proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan BUMN tahun 2013-2016?
3. Apakah pengaruh secara parsial ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan BUMN tahun 2013-2016?
4. Apakah pengaruh secara parsial proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan BUMN tahun 2013-2016?

5. Apakah pengaruh secara parsial ukuran komite audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan BUMN tahun 2013-2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan BUMN tahun 2013-2016.
2. Untuk mengetahui secara simultan ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan BUMN tahun 2013-2016.
3. Untuk mengetahui secara parsial ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan BUMN tahun 2013-2016.
4. Untuk mengetahui secara parsial proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan BUMN tahun 2013-2016.
5. Untuk mengetahui secara parsial ukuran komite audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan BUMN tahun 2013-2016.

1.6 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Kegunaan penelitian ini diantaranya adalah :

1.6.1 Aspek Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan BUMN tahun 2013-2016.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih bagi pembaca dan sebagai sarana pengembangan serta penerapan teori ilmu pengetahuan mengenai pengungkapan CSR pada perusahaan BUMN.

1.6.2 Aspek Praktis

- a. Bagi perusahaan BUMN, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan.
- b. Bagi investor dan calon Investor, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan penanaman modal ke suatu perusahaan tertentu khususnya perusahaan BUMN

karena membantu memberikan informasi kinerja keuangan tidak hanya dari segi keuangan saja tetapi juga dari segi non keuangannya.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variable independen yang digunakan ialah ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit. Sedangkan variable dependen dalam penelitian ini ialah pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Perusahaan BUMN dan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Perusahaan BUMN tahun 2013-2016. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Januari 2017 sampai dengan Juli 2017. Periode penelitian ini tahun 2013 hingga 2016.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan secara umum dan ringkas mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Ruang Lingkup Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang terkait dengan *Good Corporate Governance* dan Luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai dugaan sementara atas perumusan masalah dan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, variable operasional yang digunakan, tahapan penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data dan teknik yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran atau rekomendasi yang diberikan penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan serta kelengkapan akhir yang terdiri dari daftar pustaka sumber referensi penelitian dan lampiran.